

PRESS RELEASE

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya

Bawaslu Kota Surabaya dalam upaya melaksanakan pencegahan pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024.

Dimensi dalam IKP Pemilihan Tahun 2024 Dalam Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 meliputi 4 dimensi yakni 1.) Dimensi Konteks Sosial Politik, 2.) Dimensi Penyelenggaraan Pemilu, 3.) Dimensi Kontestasi dan 4.) Dimensi Partisipasi. Empat Dimensi utama di atas terbagi lagi ke dalam 12 (dua belas) sub dimensi dan 61 (enam puluh satu) indikator.

A. Temuan Pemetaan Kerawanan

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024, dari 61 indikator kerawanan, terdapat 14 (empat belas) indikator yang dianggap berpotensi terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Surabaya. Indikator-indikator tersebut antara lain:

| No. | Isu | Dampak | Bobot |
|-----|--|--|--------|
| 1. | Pemungutan suara tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (adanya pelanggaran) | 1. Pemungutan Suara Ulang; 2. Konflik Sosial dan Politik di masyarakat; 3. Perselisihan Hasil Pemilu. | Sedang |
| 2. | Pemungutan Suara Ulang | 1. Bertambahnya beban biaya negara; 2. Menurunnya Kepercayaan Publik kepada penyelenggara Pemilu. | Sedang |
| 3. | Surat suara yang tertukar | 1. Rekomendasi/catatan khusus Pengawas Pemilu; 2. Pemungutan Suara Ulang; 3. Meningkatkan ketegangan politik; 4. Penambahan beban biaya pemilu. | Sedang |
| 4. | Sengketa proses Pemilu | 1. Terlambatnya pelaksanaan tahapan | Sedang |

| No. | Isu | Dampak | Bobot |
|-----|--|--|--------|
| | | pemilu/pemilihan; 2. Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem pemilu; 3. Menambah beban biaya administrasi pemilu. | |
| 5. | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | 1. Dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik; 2. Dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu maupun penyelenggara pemilu. | Sedang |
| 6. | Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang belum dicoret dari DPT | 1. Pengadaan/ketersediaan logistik surat suara di hari pemungutan suara; 2. Penyalagunaan data pemilih oleh pihak yang berkepentingan. | Sedang |
| 7. | Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu | Turunnya kredibilitas dan integritas lembaga penyelenggara pemilu | Sedang |
| 8. | Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT | Pengadaan/ketersediaan logistik surat suara di hari pemungutan suara | Sedang |
| 9. | Penghitungan suara ulang | 1. Penambahan biaya dan logistic; 2. Penundaan pengumuman hasil akhir pemilu; 3. Memicu terjadinya ketegangan atau konflik. | Sedang |
| 10. | Catatan khusus/Rekomendasi pengawas Pemilu | 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan; 2. Mengurangi konflik atau ketegangan. | Sedang |
| 11. | Pemilih ganda identik pada Daftar Pemilih | 3. Kelebihan pengadaan/ketersediaan logistik surat suara di hari pemungutan suara; 4. Rawan penyalahgunaan data pemilih. | Rendah |
| 12. | Keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam tahapan kampanye | Ketidakpercayaan publik terhadap netralitas dan kejujuran Pemilu. | Rendah |
| 13. | Netralitas ASN/TNI/POLRI | 1. Menurunnya | Rendah |

| No. | Isu | Dampak | Bobot |
|-----|---|--|--------|
| | | kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan proses pemilu; 2. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau personel dalam institusi pemerintahan; 3. Adanya konflik kepentingan. | |
| 14. | Pemilih yang sudah memiliki hak memilih belum melakukan perekaman e-ktp | Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya | Rendah |

B. Langkah Antisipasi (Mitigasi Dan Pencegahan)

Sebagai langkah antisipasi, Bawaslu Kota Surabaya telah menyusun strategi mitigasi dan pencegahan berbasis kerawanan seperti memberikan imbauan kepada penyelenggara dan peserta Pemilu pada setiap tahapan, memberikan saran perbaikan apabila terjadi dugaan pelanggaran, berkoordinasi dengan stakeholder terkait, sosialisasi pengawasan partisipatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan membuka posko aduan masyarakat di setiap tahapan baik di tingkat Kota maupun Kecamatan.

Selain langkah antisipasi, strategi pengawasan Bawaslu Kota Surabaya yaitu dengan melakukan patroli pengawasan di titik-titik rawan, melakukan pengawasan melekat dan meningkatkan kompetensi serta kapasitas jajaran pengawas pemilu adhoc.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Humas Bawaslu Kota Surabaya
Telepon: (031) 99857450
Email: set.surabaya@bawaslu.go.id
Website: Bawaslu Kota Surabaya